

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan PUU dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan PUU dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Perda 15 Pergub 85 Keggub 750
2. Produk hukum daerah kab/kota yang sesuai dengan PUU dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Jumlah produk hukum daerah kab/kota yang sesuai dengan PUU dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Ranperda kab/kota 35 Perda kab/kota 30 Pert KDH dan DPRD kab/kota 30
3. Perkara yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah perkara sengketa hukum pemerintah provinsi yang dapat ditangani	4
4. Meningkatnya perlindungan hukum bagi masyarakat miskin	Jumlah dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang disalurkan melalui organisasi bantuan hukum	6
5. Meningkatnya aksesibilitas terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum	Persentase produk hukum yang dapat didokumentasikan/ diakses melalui portal website SJDIH Pemerintah Provinsi	100%

No	Program	Anggaran
I	Pembangunan Materi Hukum	1.051.029.100
II	Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan	560.644.900
III	Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM	395.014.000
IV	Sarana dan Informasi Hukum	132.400.000

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

KEPALA BIRO HUKUM

dto

ENIFITA DJINIS, SH
Nip. 19620330 198903 2 004